

 <b>JAYA CM</b>	<b>DATA UMUM</b>	TANGGAL	5-Jun-23
<b>DIVISI MARKETING</b>	<b>TRANSPORTASI</b>	HALAMAN	1 / 1

	<b>NAMA PROYEK :</b>	<b>Jasa Konsultansi Konsultan Pengendali Mutu Independen ( PMI )</b>
		<b>Ruas Jalan Tol Depok Antasari</b>
	<b>PEMILIK :</b>	<b>Kementerian PUPR Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>
		<b>DKI Jakarta Jawa Barat</b>
	<b>JENIS PROYEK :</b>	<b>Jalan Tol</b>
	<b>LOKASI :</b>	<b>Ruas Jalan Tol Depok Antasari - Jakarta Selatan (Kota)</b>
	<b>PERIODE :</b>	<b>TBA</b>

1	Panjang Track:	
	- Fase 1	Km
	- Fase 2	Km
	Total	Km
	Hasil survei Lapangan	
		a.
		b.
		c.
2	Lingkup Pekerjaan	<b>Pengawasan</b>
		A.
		B.
3	Biaya Konstruksi	<b>TBA</b>
	PAGU	<b>Rp 8.433.215.000</b> incl PPN ..... % ; KSO - Jaya CM 40 %
4	Konsultan	<b>PT Jaya CM (Leader)</b>
5	Kontraktor	<b>TBA</b>

[Pengumuman](#)

[Peserta](#)

Kode Tender	85286064		
Nama Tender	Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) Ruas Jalan Tol Depok Antasari		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	43530948	Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) Ruas Jalan Tol Akses Ruas Jalan Tol Depok Antasari	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	<a href="#">📄 Uraian Kerja Paket Konsultan PMI Ruas Jalan Tol Depok Antasari.pdf</a>		
Tanggal Pembuatan	23 Mei 2023		
Tahap Tender Saat Ini	<a href="#">Download Dokumen Kualifikasi [...]</a>		
K/L/PD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
Satuan Kerja	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat		
Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi		
Metode Pengadaan	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2023		
Nilai Pagu Paket	Rp. 8.433.215.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 8.433.215.000,00
Jenis Kontrak	Waktu Penugasan		
Lokasi Pekerjaan	▪ Ruas Jalan Tol Depok Antasari - Jakarta Selatan (Kota)		
Bobot Teknis	80.0		
Bobot Biaya	20.0		
Syarat Kualifikasi	<b>Persyaratan Kualifikasi</b>		
	<div>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</div> <div>2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) KBLI 2017 atau Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) KBLI 2020 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]&lt;br/&gt;</div> <div>3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]&lt;br/&gt;</div> <div>4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)</div> <div>5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara</div> <div>6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun</div> <div>Persyaratan Kualifikasi Lain</div> <div>Persyaratan lainnya sesuai yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi</div>		
Peserta Tender	44 peserta		

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Prakualifikasi	25 Mei 2023 15:00	5 Juni 2023 15:00	Tidak Ada
2	<b>Download Dokumen Kualifikasi</b>	25 Mei 2023 15:00	8 Juni 2023 15:00	Tidak Ada
3	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	29 Mei 2023 09:00	29 Mei 2023 12:00	Tidak Ada
4	<b>Kirim Persyaratan Kualifikasi</b>	29 Mei 2023 12:01	8 Juni 2023 15:00	Tidak Ada
5	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	8 Juni 2023 15:01	19 Juni 2023 23:59	Tidak Ada
6	Pembuktian Kualifikasi	14 Juni 2023 08:00	19 Juni 2023 23:59	Tidak Ada
7	Penetapan Hasil Kualifikasi	20 Juni 2023 08:00	20 Juni 2023 11:59	Tidak Ada
8	Pengumuman Hasil Prakualifikasi	21 Juni 2023 08:00	21 Juni 2023 23:59	Tidak Ada
9	Masa Sanggah Prakualifikasi	22 Juni 2023 08:00	27 Juni 2023 09:00	Tidak Ada
10	Download Dokumen Pemilihan	27 Juni 2023 09:05	6 Juli 2023 09:00	Tidak Ada
11	Pemberian Penjelasan	30 Juni 2023 09:00	30 Juni 2023 12:00	Tidak Ada
12	Upload Dokumen Penawaran	30 Juni 2023 12:05	6 Juli 2023 09:00	Tidak Ada
13	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	6 Juli 2023 09:05	20 Juli 2023 23:59	Tidak Ada
14	Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	21 Juli 2023 08:00	21 Juli 2023 16:30	Tidak Ada
15	Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	24 Juli 2023 08:00	24 Juli 2023 23:59	Tidak Ada
16	Penetapan Pemenang	25 Juli 2023 08:00	25 Juli 2023 11:59	Tidak Ada
17	Pengumuman Pemenang	26 Juli 2023 12:00	26 Juli 2023 23:59	Tidak Ada
18	Masa Sanggah	27 Juli 2023 08:00	1 Agustus 2023 09:00	Tidak Ada
19	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	2 Agustus 2023 09:00	2 Agustus 2023 16:30	Tidak Ada
20	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	3 Agustus 2023 08:00	3 Agustus 2023 16:30	Tidak Ada
21	Penandatanganan Kontrak	4 Agustus 2023 08:00	4 Agustus 2023 16:30	Tidak Ada

**URAIAN KERJA**  
**KONSULTAN PENGENDALI MUTU INDEPENDEN (PMI)**  
**RUAS JALAN TOL DEPOK ANTASARI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol, penyelenggaraan jalan tol tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.

Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marha) mempunyai tugas dan wewenang dalam pembinaan penyelenggaraan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 20 Tahun 2020, tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Nasional Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol, diperlukan penyesuaian tata Kelola Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu (PMPM) konstruksi jalan tol dengan Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Berdasarkan Permen PUPR tersebut tugas dan wewenang Ditjen Bina Marga, mencakup monitoring aspek teknis pelaksanaan konstruksi dan pengawasan aspek quality assurance pada pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Depok Antasari.

Tujuan layanan jasa ini adalah membantu Ditjen Bina Marga untuk melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi Jalan Tol Depok Antasari, sehingga memenuhi standar mutu, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam PPJT.

Pekerjaan ini mensyaratkan penyedia jasa memiliki dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan subklasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) KBLI 2017 atau Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) KBLI 2020.